

MEDIASI

Shizuoka beli saham Resona

JAKARTA: Shizuoka Bank Ltd mengakuisisi 144.759 saham PT Bank Resona Perdana yang dimiliki pemegang saham lama.

Berdasarkan pengumuman Resona Holdings di Tokyo Stock Exchange pekan lalu, akuisisi ini setara dengan kepemilikan 5,08%. Tidak disebutkan detail nilai transaksi itu.

Namun, penuntasan transaksi ini mengacu kepada penuntasan prosedur legal yang berlaku di Indonesia. Pada akhir tahun lalu, Bank Resona Perdana memiliki modal sebesar Rp285 miliar.

Bank Resona Perdana menyediakan layanan jasa keuangan terhadap perusahaan yang terafiliasi dengan Jepang. Masuknya Shizuoka membuka jalan bagi bank tersebut untuk menggelar penetrasi bisnis di Tanah Air. (BISNIS/MMH)

Eksistensi kartu kredit

JAKARTA: Ekspansi kartu kredit PT Bank International Indonesia Tbk berpotensi terhambat akibat tercorengnya citra perbankan karena pengaruh kematian nasabah Citibank Indonesia Irzen Octa beberapa waktu lalu.

Direktur Konsumer Bank International Indonesia (BI) Stephen Liesty mengatakan skandal perbankan yang terjadi akhir-akhir berpotensi menurunkan ekspansi kartu kredit sebesar 5% dari target pertumbuhan tahun ini yang mencapai 20%.

"Target kami tumbuh 20%, [Kasus] itu bisa tidak berpengaruh bisa juga berpengaruh. Kalau ada pengaruhnya paling berkurang maksimal 5%," ujarnya pekan lalu. (BISNIS/20)

Stanchart biayai Buana

JAKARTA: Standard Chartered Bank mengucurkan fasilitas kredit jangka menengah sebesar sekitar Rp300 miliar atau US\$30 juta kepada PT Buana Finance Tbk untuk kebutuhan modal kerja dalam rangka pembiayaan konsumen.

CEO Standard Chartered Bank Indonesia Tom Aaker mengatakan fasilitas pinjaman tersebut diberikan untuk menambah dana tunai yang diperlukan bagi kegiatan operasional Buana Finance selama 3 tahun kedepan.

"Buana Finance yang sudah menjadi klien kami sejak 2008," ujarnya dalam keterangan tertulis akhir pekan lalu.

Buana Finance adalah salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia, didukung lebih dari 21 cabang di seluruh Indonesia. (BISNIS/HTA)

Kredit konsumsi melambat

Pertumbuhan sektor produktif fenomenal pada awal tahun ini

OLEH HENDRI T. ASWORO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pertumbuhan kredit konsumsi pada 3 bulan pertama 2011 melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan pembiayaan jenis sektor produktif melaju kencang.

Mengacu Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Maret 2011, pertumbuhan kredit perbankan sebagian besar ditopang oleh jenis kredit modal kerja yang tumbuh secara tahunan 35,4% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 25,2%.

Sementara itu, pertumbuhan kredit konsumsi melambat menjadi 13,2% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang mencapai 22,9%. Di sisi lain, kredit investasi tumbuh relatif stabil yakni 18,6%.

Berdasarkan data Februari 2011, kredit modal kerja menca-

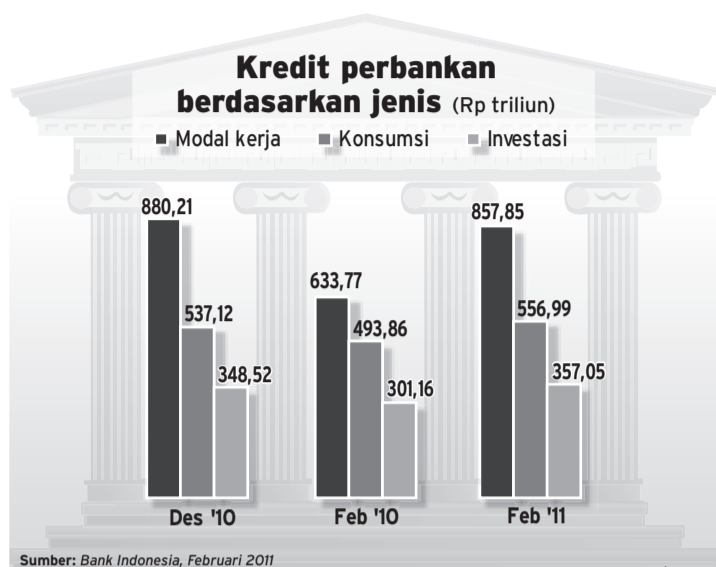
pai Rp857,85 triliun, menurun jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu Rp880,21 triliun. Namun, dibandingkan dengan periode sebelumnya naik 35,35%.

Adapun kredit investasi tercatat sebesar Rp357,05 triliun, meningkat dibandingkan dengan akhir tahun lalu Rp348,52 triliun dan periode sebelumnya Rp301,16 triliun, sedangkan kredit konsumsi sebesar Rp556,99 triliun, naik dari periode sebelumnya Rp493,86 triliun.

Berdasar sektor, menurut laporan tersebut, kredit untuk sektor perdagangan dan jasa dunia usaha merupakan penopang utama pertumbuhan kredit pada kuartal tersebut, sedangkan pertumbuhan kredit di sektor lain mengalami penurunan sejalan dengan perkembangan kredit konsumsi.

Perkembangan tersebut menunjukkan ekspansi kredit pada awal 2011 terus diikuti dengan komposisi penyaluran kredit yang membaik, sehingga diharapkan dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Direktur Bisnis Bank CIMB Niaga Handoyo Soebali ber-



pendapat bahwa fenomena pertumbuhan kredit produktif lebih besar pada awal tahun ini merupakan fenomena baru jika dibandingkan dengan segmen konsumen yang biasanya cenderung agresif.

"Kredit tumbuh kalau ada permintaan. Dari promosi produk konsumen biasanya cukup generik, tetapi kalau yang tumbuh lebih cepat adalah dari sisi sektor produktif maka ini merupakan tren baru," ujarnya kepada Bisnis kemarin.

Dampak positif

Dia berpendapat pertumbuhan kredit produktif memberikan dampak positif bagi sektor riil, karena memperluas lapangan kerja sebab banyak investasi bank. Namun, menurut dia, bisa saja peningkatan kredit itu karena realisasi komitmen dari tahun sebelumnya.

BI kaji pemisahan bisnis bank investasi

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Bank Indonesia tengah mengkaji fungsi bank investasi dengan melihat urgensi pemisahan dari perbankan komersial sebagai salah satu langkah efisiensi dan menjamin keamanan dana nasabah.

Halim Alamsyah, Deputy Gubernur Bank Indonesia mengungkapkan fungsi bank investasi sebaiknya terpisah agar skala bisnis menjadi lebih kecil. Hal ini dilakukan guna menghindari kompleksitas dan mempermudah pengawasan.

"Kelihatannya investment banking dan commercial banking perlu kami peragas [posisinya]," ujar Halim di Jakarta pekan lalu.

Menurutnya di bank sentral sebagai otoritas perbankan berkepentingan adalah menjaga industri perbankan sehat dan memastikan dana nasabah aman.

Namun, Halim menegaskan BI masih menanti dan melihat (wait and see), mempertimbangkan kecenderungan serta pola menabung masyarakat sehingga keputusan belum diambil dalam waktu dekat.

Cara ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perbankan serta persaingan yang sehat. Sebab, persaingan industri perbankan di Indonesia secara keseluruhan relatif tidak tinggi. Persaingan yang cukup ketat hanya tampak dalam sektor tertentu

seperti mikro dan konsumen.

Pernyataan Halim terkait dengan dengan maraknya layanan khusus perbankan bagi nasabah-nasabah kaya dalam berinvestasi. Semua ini diwujudkan dalam layanan prioritas, di mana nasabah tidak saja menaruh dana dalam deposito tetapi juga dalam bentuk investasi lain seperti asuransi dan reksa dana.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Manajer Keuangan Bersertifikat Irman Alfian Zahiruddin menilai pemisahan kedua jenis praktik perbankan itu dapat saja dilakukan dengan merujuk Amerika Serikat dan Inggris. Pemisahan diharapkan dapat lebih melindungi nasabah dan bank dari

kemungkinan dampak negatif bagi keduanya.

Di samping itu, dia beranggapan pemerintah perlu membuat standarisasi bank investasi atau yang lebih sering dikenal sebagai layanan prioritas. Standarisasi sebaiknya untuk mengatur layanan prioritas dalam industri perbankan secara umum.

"Namun, dalam hal pemberian pelayanan lebih serta segmentasi konsumen, tergantung bank, akan dibuat seperti apa. Kalau berdasarkan hal ini tidak perlu standarisasi," tutur Irman yang juga Direktur Konsumer BTN ini.

Dia menjelaskan, saat ini Indonesia mengenal lima klasifikasi nasabah prioritas, yaitu prime

customer yang memiliki dana Rp500 juta-Rp500 juta, priority banking Rp500 juta-Rp5 miliar, serta private banking dengan dana di atas Rp5 miliar. Adapun, klasifikasi terakhir yang belum banyak ditemui adalah ultra high networth individual yang memiliki dana US\$2 juta.

Klasifikasi ini, jelasnya, hanya berupa istilah yang kerap ditemui tanpa ada standar dari otoritas. Oleh sebab itu, beberapa bank menggunakan istilah priority banking meskipun dana per nasabah di atas Rp5 miliar. Contoh lain, beberapa bank juga menggunakan istilah private banking bagi nasabah perorangan dengan dana Rp2 miliar. (13)

PT ASURANSI PAROLAMAS

Kantor Pusat :
Komplek Golden Plaza Blok G 39-42
Jl. RS. Fatmawati No. 15
Jakarta 12420
Website http://www.parolamas.co.id

LAPORAN KEUANGAN



NERACA			
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009			
(dalam jutaan rupiah)			
KEKAYAAN	2010	2009	
I. INVESTASI			I. UTANG
1 Deposito Berjangka & Sertifikat Deposito	55.825	44.235	1 Utang Klaim
2 Saham	2.727	176	2 Utang Reasuransi
3 Obligasi dan MTN	-	-	3 Utang Komis
4 Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau BI	507	-	4 Utang Pajak
5 Unit Penyertaan Reksadana	62	61	5 Biaya Yang Masih Harus Dibayar
6 Penyertaan Langsung	904	373	6 Utang Bagi Hasil
7 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk investasi	10.122	8.059	7 Utang Zakat
8 Pinjaman Hipotik	-	-	8 Utang Lain
9 Pembiayaan Murabahah	-	-	9 Jumlah Utang (1 s/d 8)
10 Pembiayaan Mudharabah	-	-	
11 Investasi Lain	-	-	II. CADANGAN TEKNIS
12 Jumlah Investasi (1 s/d 11)	70.147	52.904	10 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
			11 Cadangan Klaim (EKRS) 2)
II. BUKAN INVESTASI			12 Jumlah Cadangan Teknis (10 + 11)
13 Kas dan Bank	10.531	9.622	13 Jumlah Kewajiban (9 + 12)
14 Tagihan Premi Penutupan Langsung	15.640	17.554	
15 Tagihan Reasuransi	4.991	8.690	14 Dana Tabarru'
16 Tagihan Hasil Investasi	90	64	
17 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk dipakai sendiri	37.464	26.039	15 Pinjaman Subordinasi
18 Perangkat Keras Komputer	379	443	
19 Aktiva Tetap Lain	2.998	4.228	III. MODAL SENDIRI
20 Aktiva Lain	5.880	6.452	16 Modal Disetor
21 Jumlah Bukan Investasi (13 s/d 20)	77.973	73.092	17 Agio Saham
			18 Cadangan
22 Jumlah Kekayaan (12 + 21)	148.120	125.996	19 Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga
			20 Selisih Penilaian Aktiva Tetap
			21 Saldo Laba
			22 Jumlah Modal Sendiri (16 s/d 21)
			23 Jumlah Kewajiban, Dana Tabarru' dan Modal Sendiri (13+14+15+22)

Neraca tersebut termasuk kekayaan dan kewajiban dari usaha asuransi atau reasuransi dengan prinsip syariah dengan rincian sebagai berikut :

Cabang Asuransi/Reasuransi Dengan Prinsip Syariah			
(dalam jutaan rupiah)			
No	URAIAN	2010	2009
1	Kekayaan		
a.	Investasi	10.553	6.401
b.	Bukan Investasi	18.117	17.578
	Jumlah Kekayaan	28.670	13.979
2	Kewajiban		
a.	Utang	880	535
b.	Cadangan Teknis	1.737	932
	Jumlah Kewajiban	2.617	1.467
3	Pendapatan Underwriting	2.956	2.026
4	Beban Underwriting	450	1.644
5	Hasil Investasi	192	170
6	Beban Usaha	1.587	862

DEWAN PENGAWAS SYARIAH			
1.	DR. H. ANWAR ABBAS, MM., M.Ag		
2.	IRSVAL ISMAIL, AK, APAI		
3.	DRS. SAYED USMAN, SH., MH		

REASURADUR UTAMA			
Nama Reasuradur Konvensional			
Reasuransi Dalam Negeri			
1	PT Reasuransi Nasional Indonesia		
2	PT Reasuransi Internasional Indonesia		
3	PT Maskapai Reasuransi Indonesia		
4	PT Tugu Reasuransi Indonesia		
5	PT Asuransi Jasa Indonesia		
6	PT Asuransi Kredit Indonesia		
7	PT Asuransi Ekspor Indonesia		
Reasuransi Luar Negeri			
1	Sirius International, Singapore		
2	Best Reinsurance Co. Ltd., Kuala Lumpur		
3	R + V Versicherungs AG, Singapore		
4	Kuwait Re		
5	Hannover Re		

REASURADUR UTAMA			
Nama Reasuradur Syariah			
Reasuransi Dalam Negeri			
1	PT Reasuransi Nasional Indonesia		
2	PT Reasuransi Internasional Indonesia		
3	PT Maskapai Reasuransi Indonesia		
4	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967		

PERHITUNGAN LABA/RUGI			
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA			
31 DESEMBER 2010 DAN 2009			
(dalam jutaan rupiah)			
No.	URAIAN	2010	2009
1	PENDAPATAN UNDERWRITING		
2	Premi Bruto		
3	a. Premi Penutupan Langsung	116.878	115.403
4	b. Premi Penutupan Tidak Langsung	4.513	2.754
5	c. Komisi Dibayar	-	-
6	Jumlah Premi Bruto (3+4+5)	121.391	118.157
7	Premi Reasuransi		
8	a. Premi Reasuransi Dibayar	64.150	64.297
9	b. Komisi Reasuransi Diterima	64.150	64.297
10	Jumlah Premi Reasuransi (8-9)	128.300	128.594
11	Premi Neto (6-10)	57.241	53.860
12	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP 1)		
13	a. CAPYBMP tahun lalu	20.876	21.299
14	b. CAPYBMP tahun berjalan	22.896	21.544
15	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP (13-14)	(2.020)	(245)
16	Jumlah Pendapatan Premi Neto (11+15)	55.221	53.615
17	Pendapatan Underwriting Lain Neto	-	-
18	PENDAPATAN UNDERWRITING (16+17)	55.221	53.615
19	BEBAN UNDERWRITING		
20	Beban Klaim		
21	a. Klaim Bruto	53.559	44.274
22	b. Klaim Reasuransi	29.899	18.902
23	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim		
24	c.1. Cadangan Klaim tahun berjalan	10.781	13.437
25	c.2. Cadangan Klaim tahun lalu	13.172	20.019
26	Jumlah Beban Klaim (21-22+24-25)	21.269	18.790
27	Beban Underwriting Lain Neto	-	-
28	BEBAN UNDERWRITING (26+27)	21.269	18.790
29	HASIL UNDERWRITING (18-28)	33.952	34.825
30	Hasil Investasi	1.660	2.352
31	Bagi Hasil	-	-
32	Beban Usaha	-	-
33	a. Beban Pemasaan	2.525	1.114
34	b. Beban Umum dan Administrasi	22.961	22.898
35	Jumlah Beban Usaha (33+34)	25.486	24.012
36	LABA (RUGI) USAHA (33+34)		
37	(29+30+31-35)	10.126	13.165
38	LABA (Beban) Lain	1.544	870
39	LABA SEBELUM ZAKAT	11.670	14.035
40	Zakat	-	-
41	LABA SEBELUM PAJAK	11.670	14.035
42	Pajak Penghasilan	3.024	3.271
43	LABA SETELAH PAJAK	8.646	10.764

Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'			
Untuk Periode yang Berakhir Pada			
31 Desember 2010 dan 2009			
(dalam jutaan rupiah)			
No.	URAIAN	2010	2009
1	Pendapatan Asuransi	5.580	1.872
2	Kontribusi bruto	(1.688)	(1.006)
3	Ujroh pengelola	(1.766)	(203)
4	Bagian reasuransi (atas risiko)	(857)	357
5	Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(269)	-
6	Jumlah pendapatan Asuransi	1.269	1.020
7	Beban Asuransi		
8	Pembayaran klaim	1.046	1.574
9	Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	(645)	-
10	Klaim yang masih harus dibayar	102	320
11	Beban penyesihan teknis	(53)	(250)
12	Jumlah beban asuransi	450	1.644
13	Surplus (Defisit) Neto Asuransi	819	(624)
14	Pendapatan investasi neto	175	159
15	Penghasilan (Beban) Lain	19	-
16	Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'	1.013	(465)

BATAS TINGKAT SOLVABILITAS		
KETERANGAN		
	2010	2009
PEMENUHAN TINGKAT SOLVABILITAS		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Kekayaan Yang Diperkenankan	102.192,00	92.516,00
b. Kewajiban	43.953,00	45.033,00
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	58.239,00	47.483,00
B. BISM 3)	17.003,49	16.810,18
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS	41.235,51	30.672,82
D. Rasio Pencapaian (%) 4)	342,51%	282,47%
INFORMASI LAIN		
	2010	2009
a. Jumlah Deposito Jaminan	4.600	4.535
b. Rasio Investasi (SAP) terhadap cadangan teknis dan utang klaim retensi sendiri (%)	178,98%	133,72%
c. Rasio Likuiditas (%)	174,68%	157,37%
d. Rasio Premi Retensi Sendiri terhadap Modal Sendiri (%)	56,61%	66,52%
e. Rasio Jumlah Premi Penutupan Langsung terhadap Premi Penutupan Tidak Langsung (%)	2713,45%	4190,38%
f. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)	81,14%	79,83%
PEMILIK PERUSAHAAN		
1. SYARIFUDDIN HARAHAP	51,80%	
2. T. RAFFLI RACHMAN	44,38%	
3. LAINNYA	3,82%	
KOMISARIS DAN DIREKSI		
DEWAN KOMISARIS		
PRESIDEN KOMISARIS	: DJOKO SUNARNO	
KOMISARIS INDEPENDEN	: DRS. EFFENDY HM. ALI, MM	
KOMISARIS	: IR. ABDULLAH FITRIANTORO, MSC	
KOMISARIS	: DRS. TEDDY PUDJANAN, MM., AAKI-K	
DIREKSI		
PRESIDEN DIREKTUR	: SYARIFUDDIN HARAHAP	
DIREKTUR	: T. RAFFLI RACHMAN	
DIREKTUR	: CUT MARISKA, SE., ACII	

Keterangan:
1) CAPYBMP = Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
2) EKRS = Estimasi Klaim Retensi Sendiri (Cadangan Klaim)
3) BISM = Batas Tingkat Solvabilitas Minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk menutup kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

4) Sesuai dengan Pasal 43 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KM/05/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah "120%".